

# MEMO HUKUM

*INDRA ANDJARSARI*

## PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM DITINJAU DARI SISTEM PEMBUKTIAN



ICIC.

Ped. 708/96

And

p

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
S U R A B A Y A

1996

# **PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM DITINJAU DARI SISTEM PEMBUKTIAN**



## **MEMO HUKUM**

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Pembimbing,**

**RICHARD WAHJOEDI, S.H., MS.**  
**NIP. 130 531 835**

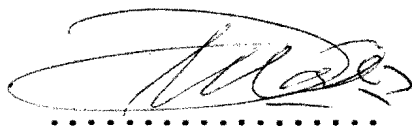
**Penyusun,**

**INDRA ANDJARSARI**  
**NIM. 039213511**

Memo Hukum ini telah diuji dan disetujui pada tanggal 26  
Januari 1996 oleh para penguji :

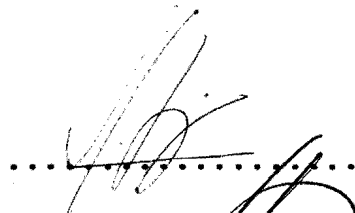
1. Soedarti, S.H.

Ketua Penguji



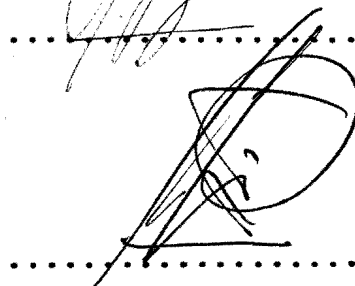
2. Soecharjo, S.H.

Sekretaris Penguji



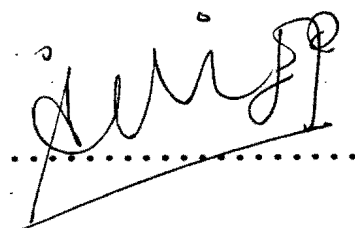
3. Richard Wahjoedi, S.H.,MS

Anggota Penguji/Pembimbing



4. Didik Endro P , S.H.,MH

Anggota Penguji



#### IV. PENUTUP.

##### 1. Kesimpulan

- a. Putusan batal demi hukum adalah putusan yang batal dengan sendirinya, maksudnya putusan tersebut dari semula dianggap tidak pernah ada. Jadi putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum sehingga, putusan batal demi hukum sejak semula tidak memiliki daya eksekusi/tidak dapat dilaksanakan.
- b. Sistem pembuktian dalam teori dikenal ada beberapa bentuk, Indonesia menganut sistem negatief wettelijk. Hal ini diatur dalam pasal 183 KUHP, pada masa berlakunya RIB diatur dalam pasal 294 dan pasal 298 RIB.
- c. Keterangan terdakwa sewaktu diperiksa dalam penyidikan berupa pengakuan, walaupun tidak disebut sebagai alat bukti sah dalam pemeriksaan di muka persidangan adakalanya masih perlu diperhatikan oleh hakim tentang kebenaran dan ketidakbenaran pengakuan yang dimungkirinya di muka persidangan.
- d. Pada prinsipnya, keterangan terdakwa berupa pengakuan bukan merupakan alat bukti sah menurut KUHP. tetapi merupakan bagian dari keterangan terdakwa.
- e. Keterangan terdakwa berupa pengakuan telah melakukan tindak pidana di muka persidangan, tanpa didukung alat bukti sah lainnya, tidak berkekuatan pembuktian, sehingga hakim tidak berkeyakinan bahwa terdakwa telah bersa-

lah, oleh karena itu ia harus dibebaskan dari dakwaan.

- f. Keterangan terdakwa di depan sidang adalah merupakan suatu alat bukti sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang.
- g. Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim mempunyai kekuatan mutlak untuk menentukan suatu perbuatan pidana telah benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Untuk menumbuhkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah .

Jadi kesimpulan yang saya peroleh menunjukkan gambaran tidak akan mempengaruhi banyak terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim baik itu berupa pengakuan maupun pengingkaran selama keyakinan dan alat bukti untuk itu tidak menunjang.

## **2. Saran**

- a. Dalam memutus perkara hakim berdasarkan keyakinannya yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah, oleh karena itu hakim juga jangan cepat percaya terhadap pengakuan terdakwa antara satu alat bukti lainnya harus dihubungkan untuk memperoleh satu keyakinan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, hendaknya segala ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dijalankan secara konsekwen oleh para penegak hukum.